JUMABI : Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis

e-ISSN: 2985-3834 (Online - Elektronik)
Volume.2 | Nomor.1 | Januari | 2024 | PP : 1-11
DOI: https://doi.org/10.56314/jumabi.v2i1

Analisis Pengendalian Internal Sistem Pengelolaan Aset Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang

Fira Fadhilla Firman[1] Aini Indrijawati[2] Darmawati[3]
[1,2,3]Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Corresponding author*
E-mail: fira.fadhilla0810@gmail.com

Article history
Received : 09-01-2024
Revised : 22-01-2024
Accepted : 25-01-2024

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, rumah sakit harus memberikan pelayanan yang professional dalam menjalankan tugasnya. Untuk meningkatkan efektivitas dalam hal tersebut sistem pengendalian internal harus baik agar dapat mengevaluasi sistem operasional rumah sakit yang berlangsung utamanya dalam hal kelengkapan fasilitas rumah sakit. Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada rumah sakit umum daerah harus sesuai dengan standar yang te;aj ditetapkan, dalam hal ini sesuai dengan Standar Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, yang meliputi lima komponen : (1) Lingkungan Pengendalian (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal atas pengelolaan aset yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan Standar dalam SPIP. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal pada pengelolaan aset terbagi atas proses penerimaan aset, proses penyimpanan aset dan proses pengeluaran aset, juga ditemukan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Kata kunci: *Aset, Pengendalian Internal, SPIP, Rumah Sakit*

PENDAHULUAN

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang diharapkan menjaga keseluruhan proses operasional suatu instansi. Pengendalian internal menjadi salah satu faktor penting agar sistem rumah sakit dapat berjalan dengan efektif (Zalsabila dkk., 2023) karena pengendalian internal dapat memenuhi fungsi sistem informasi akuntansi menyangkut adanya pengendalian yang memadai untuk pengamanan aset data rumah sakit (Fitri dkk., 2023) dan memastikan agar tujuan rumah sakit tercapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2017 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum, Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan orgamsasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Hal ini mempertegas pentingnya pelaksanaan proses pengendalian internal bagi seluruh badan layanan umum termasuk Rumah sakit.

Penerapan pengendalian internal secara maksimal pada rumah sakit menjadikan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, baik dalam hal persaingan (Arniati dkk., 2023), pergeseran permintaan pelanggan dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang juga, kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* dapat diperkecil. Kalaupun kesalahan dan *fraud* masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin sedangkan, jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* sangat besar.

Tinjauan Pustaka

Pengendalian Internal

Menurut Tuanakotta (2013: 352), pengendalian internal adalah proses, kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO) (2013), pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen dan personal lainnya, yang dirancang untuk memberi keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi (*operations*), pelaporan (*reporting*), dan kepatuhan (*compliance*).

Pentingnya Pengendalian Internal

1. Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi semakin rumit. Untukdapat mengawasi operasi organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dananalisa.
2. Tanggung jawab utama untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan terletak pada manajemen, sehingga manajemen harus mengatur sistem pengendalian internal yang sesuai untuk memenuhi tanggungjawab tersebut.
3. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan-kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling

cek ini merupakan salah satu karakteristik sistem pengendalian internal yang baik.

Unsur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017:130) unsur pokok sistem pengendalian internal ada empat unsur, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokokperusahaan.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
3. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara- cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Komponen Pengendalian Internal



Gambar 2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Sumber: bpkp.go.id, 2008)

Komponen PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harusmenciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Setiap entitas menghadapi berbagai risiko dari sumber eksternal maupun internal risiko didefinisikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko terhadap pencapaian tujuan dianggap relatif atau tergantung pada toleransi risiko yang ditetapkan entitas. Dengan demikian, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan unsur ketiga SPIP yang wajib diterapkan dalam instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information andCommunication*)

Informasi diperlukan entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuan manajemen menggunakan informasi yang relevan untuk mendukung berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal. Komunikasi adalah bersifat terus menerus yang menyediakan berbagai dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi internal adalah sarana untuk menyebarkan informasi ke seluruh organisasi. Hal tersebut memungkinkan personil atau karyawan menerima pesan yang jelas dari manajer senior yang mengontrol tanggung jawab. Komunikasi eksternal adalah dua kali lipat dari komunikasi internal menyediakan informasi kepada pihak eksternal dalam menanggapi kebutuhan dan harapan pihak eksternal. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5. Pemantauan(*Monitoring*)

Pemantauan adalah evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal ada dan berfungsi. Evaluasi berkelanjutan dibangun dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas, memberikan informasi yang tepat waktu,sedangkan evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi yang berkelanjutan dan pertimbangan manajemen lainnya, temuan akan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh regulator.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih.Tujuan dari penelitian ini dalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh *Brand image* dan *Beauty vlogger* terhadap minat beli kosmetik make over dimedia sosial *Instagram & Youtube* (Studi kasus pada masyarakat kota bima).

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Berdasarkan tekhnik pengumpulan data, maka instrumen penelitian pada penelitian ini adalah kuesioner yaitu sejumlah daftar pernyataan yang tertulis yang berkaitan dengan indikator dari variabel yang menggunakan skala likert .

Menurut Sugiono (2015: 80) populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan kosmetik make over.

Penarikan sampel secara Purposive merupakan cara penarikan sampel yang diambil dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu dan dianggap mewakili suatu populasi,dimana kriteria yang menjadi sampel adalah masyarakat yang menggunakan produk make over.kriteria atau ciri-ciri yang menjadi sampel yaitu a)Berumur 20-45 tahun ke atas, b) Menggunakan produk make over, c) Pernah melihat foto/video ulasan produk make over oleh *Beauty vlogger* di *instagram atau youtube*

Menurut Sugiyono (2015:81) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dikarenakan jumlah populasi yang tidak dikatahui secara pasti maka menentukan besarnya sampel yaitu dengan menggunakan Rumus Unknown population Sugiyono (2016:85). Jadi jumlah sampel yang akan diteliti adalah sebesar 96,04 Responden. Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang baik ,maka sampel yang akan diambil menjadi 100 Responden. Dan penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Bima.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2016) Observasi adalah Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016),wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari Responden yang lebih mendalam.

3. Angket (kuesioner)

Menurut Sugiyono (2016) Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

4. Study pustaka

Menurut Sugiyono (2016) Study Pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai ,budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Digunakan untuk mengukur sehat atau tidak,serta valid atau tidaknya suatu kuesioner.Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesionernya mampu

untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.Menurut Gozali (2011) dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Hail nilai Corrected item total Correlation >0.30 = Valid
- Hasil nilai Corrected item total Correlation <0.30 = tidak valid

Merupakan alat untuk mengukur suatu daftar pertanyaan kuesioner yang merupakan indikator dari variabel-variabel yang diteliti. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid .Menggunakan nilai acuan Cronbach Alpha.

- Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,06 maka kuesioer atau angket dinyatakan reliabel.
- Jika nilai Cronbach's Alpha < 0,06 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel.

b. Regresi Linear Berganda

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa analisis linear berganda digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilau variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan atau diturunkan.

c. Analisis Koefisien korelasi dan Koefisien Determinasi

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara variabel bebas secara keseluruhan dengan variabel terikat. Koefisien determinasi

Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koofesiensi penentu,karena besarnya adalah kuadrat koefisensi korelasi (r).

d. Uji T

Digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikat.Pada uji statistik t dibutuhkan tabel t Yang digunakan untuk perbandingan ,apakah sebuah pengujian yang menggunakan t hitung dikatakan signifikan atau tidak.

e. Uji simultan Uji F

Uji simultan (F) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait secara gabungan. Pada Uji Simultan (F) digunakan F tabel sebagai perbandingan ,apakah sebuah pengujian yang menggunakan F hiitung dikatakan signifikan atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Penerapan Pengendalian Internal Sistem Pengelolaan Aset yang dilakukan RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang

Pengumpulan data di Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo tepatnya di Sub Unit Aset. Ibu Hamida Amir, SKM selaku Koordinator Penanggungjawab Sub Unit Aset menfasilitasi peniliti untuk melakukan wawancara dan mendapatkan data terkait hal-hal yang diperlukan penelitian pengelolaan aset mulai dari penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran aset. Berikut pembahasan penerapan sistem pengendalian internal RSUD Nene Mallomo berdasarkan lima komponen SPIP yang dianalisis meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

   Indikator lingkungan pengendalian yakni: (1) Komitmen terhadap integritas dan nilai etika; (2) Komitmen terhadap kompetensi; (3) Kepemimpinan yang kondusif; (4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; (5)

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; (6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; (7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan (8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait melaksanakan audit untuk periode yang sama.

2. Penilaian Risiko
   Indikator penilaian risiko: (1) Identifikasi risiko (2) Analisis risiko.
3. Kegiatan Pengendalian
   Indikator kegiatan pengendalian: (1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; (2) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; (3) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; (4) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; (5) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan (6) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
4. Informasi dan Komunikasi
   Indikator informasi dan komunikasi: (1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan (2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan
   Indikator pemantauan: (1) Pemantauan berkelanjutan. (2) Evaluasi terpisah. (3) Tindak lanjut.

Dalam pelaksanaan pengendalian internal, RSUD Nene Mallomo diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016, Sub Unit Aset yang terdiri dari lima pegawai. Pengelolaan aset terbagi atas proses penerimaan aset, proses penyimpanan aset dan proses pengeluaran aset. Proses perencanaan dan pengadaan aset tidak dilakukan pada bagian Sub Unit Aset tetapi pada bagian Umum RSUD Nene Mallomo, berikut penjelasan alur proses pengelolaan aset di RSUD Nene Mallomo:

1. Proses Penerimaan dan Penyimpanan Aset
   Setelah barang beserta faktur pembelian dikirimkan oleh distributor, pihak Sub Unit Aset rumah sakit melakukan penerimaan satu pintu di ruang penerimaan setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian antara barang dan faktur pembelian. Jika sudah sesuai, barang akan disimpan di gudang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan pihak penerimaan menyusun laporan penerimaan barang yang akan divalidasi oleh Kordinator Sub Unit Aset dan setelahnya akan diarsip oleh fungsi akuntansi aset.
2. Proses Pengeluaran Aset
   Proses pengeluaran di Rumah Sakit Nene Mallomo diawali oleh permintaan barang oleh pegawai, kemudian dilakukan pengecekan stok. Jika barang yang diminta ada, maka pegawai aset melakukan pelayanan terhadap permintaan tersebut dengan mencatat pada daftar penyaluran barang.

Membandingkan Prinsip Pengendalian Internal Menurut SPIP dengan Pelaksanaan Pengendalian Internal di RSUD Nene Mallomo

Setelah melakukan wawancara dan menganalisis dokumen pengendalian internal

menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal di RSUD Nene Mallomo telah dilaksanakan sesuai pedoman sistem pengendalian internal pemerintah, menyusun dan melaksanakan indikator-indikator tiap komponen yang ada. Namun, dari lima komponen yang dianalisis terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip sistem pengendalian internal pemerintah, berikut pembahasannya pada tabel 1:

Tabel 1
Perbandingan Prinsip Pengendalian Internal Menurut SPIP dengan Pelaksanaan Pengendalian Internal di RSUD Nene Mallomo yang belum sesuai

Pengendalian Internal Komponen Lingkungan Pengendalian		
No.	**Prinsip Pengendalian Internal Menurut SPIP**	**Pelaksanaan Pengendalian Internal di RSUD Nene Mallomo**
1.	Manajemen membentuk, dengan pengawasan dari komisaris, struktur, jalur pelaporan, dan kewenangan serta tanggung jawab yang sesuai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.	Rumah sakit membentuk struktur organisasi bagian aset dan logistik secara umum dan belum baik karena setiap tugas dilaksanakan dengan bekerja sama sehingga banyak rangkap fungsi kurang pembatasan kewenangan dan tanggungjawab. Fungsi penerimaan, penyimpanan dan pemeriksaan dilaksanakan bersama karena keterbatasan tenaga di sub unit aset.
2.	Rumah sakit menunjukkan adanya komitmen untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.	Rumah sakit memiliki syarat-syarat dalam merekrut pegawai yang memiliki komitmen tinggi melalui proses rekrutmen yang telah ditentukan dalam aturan yang berlaku. Rumah sakit merekrut pegawai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan seperti staf aset dan logistik berlatar belakang pendidikan kesehatan atau ekonomi dan memiliki surat kompetensi. Proses pelatihan pegawai yang ada di rumah sakit dilakukan langsung melalui pengajaran oleh pegawai senior sehingga pegawai baru dapat memahami operasi pengelolaan aset. Namun, rumah sakit belum menetapkan kebijakan untuk mempertahankan pegawai dalam bentuk

		reward, juga dalam belum ada kebijakan yang mengatur mengenai program rutin pengembangan pegawai.
	Pengendalian Internal Komponen Penilaian Risiko	
No.	**Prinsip Pengendalian Internal Menurut SPIP**	**Pelaksanaan Pengendalian Internal di RS Nene Mallomo**
1.	Rumah sakit mempertimbangkan potensi terjadinya *fraud* dalam menilai risiko.	Rumah sakit belum mempertimbangkan mempertimbangkan potensi terjadinya fraud karena kemudahan pegawai untuk memperoleh akses persediaan rumah sakit dan sistem otorisasi pengelolaan aset yang kurang baik.
	Pengendalian Internal Komponen Aktivitas Pengendalian	
1.	Rumah sakit telah menyeleksi dan membangun aktivitas pengendalian umum dengan menggunakan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.	Rumah sakit telah membuat dan menjalankan aktivitas pengendalian yang memadai demi pencapaian tujuan perusahaan dengan penggunaan gembok, CCTV dan pembatasan akses gudang untuk menghindari pencurian. Namun, Rumah Sakit belum memaksimalkan penggunaan teknologi dalam fungsi pelaporan.
	Pengendalian Internal Komponen Informasi dan Komunikasi	
1.	Perusahaan memiliki sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan yang mencakup semua transaksi.	Rumah sakit belum memiliki aplikasi sistem informasi, semua dilakukan pencatatan dilakukan secara manual menggunakan kertas dan disimpan dalam bentuk dokumen.

Dari hasil wawancara dan analisis perbandingan menunjukkan adanya beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar SPIP. Sistem pengendalian internal rumah sakit telah dijalankan berdasarkan standar SPIP tetapi belum sepenuhnya sesuai dan masih membutuhkan beberapa perbaikan demi mencapai sistem pengendalian internal yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai beikut:

Penerapan pengendalian internal sistem persediaan obat di Rumah Sakit Nene Mallomo mencakup proses penerimaan aset, proses penyimpanan aset dan proses pengeluaran aset.

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) masih ada beberapa indikator yang membutuhkan perbaikan agar dapat mencapai sistem pengendalian internal yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, Darmawati, & Nirwana. (2023). Pengaruh Analisis Rasio Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar). JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis, 1(1), 9–20. https://doi.org/10.56314/jumabi.v1i1

Arniati, Muhammad Ikram Idrus, Muryani Arsal, & Iis. (2023). Analisis Pendapatan Petani Bawang Merah Di Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis, 1(2), 107–123. https://doi.org/10.56314/jumabi.v1i2

Awoah, A. A. G., & Manampiring, A. E. (2022). Evaluasi Manajemen Pelayanan Kefarmasian, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 Tahun 2016 di Hospital Nacional Guido Valadares Dili Timor Leste. HEALTH CARE: JURNAL KESEHATAN, 11(1), 121-133.

Dinda Zalsabila, Besse Nurul Kafilawaty, & Abdul Rahman. (2023). Peran Public Relation Dalam Penanganan Complain Terhadap Loyalitas Pasien Di Instalasi Rawat Jalan. INHEALTH : INDONESIAN HEALTH JOURNAL, 2(1), 84~93. https://doi.org/10.56314/inhealth.v2i1

Fitri, G., Nirwana, & Darmawati. (2023). Analisis Kinerja Publik Berdasarkan Permenpan No.17 Tahun 2017 (Studi Kasus di Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare). JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis, 1(2), 69–79. https://doi.org/10.56314/jumabi.v1i2.

Mulyadi. (2017). Sistem Akuntansi. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Palindo, A. D. (2019). Pelaksanaan Sistem Rujukan Di Rumah Sakit Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Jakarta: Menteri Kesehatan.

Republik Indonesia. (2015). Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 418 Tahun 2015 tentang Penetapan Status BLUD Penuh Pada Rumah Sakit Nene

Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sidenreng Rappang: Bupati Sidenreng Rappang.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Pada Rumah Sakit Daerah Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang. Sidenreng Rappang: Bupati Sidenreng Rappang.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 200 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Internal Pada Badan Layanan Umum Daerah. Jakarta: Menteri Keuangan.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.